**BAB I**

**P E N D A H U L U A N**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis atau sering disebut dengan Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan SPPD berjangka 5 (lima) tahun yang memuat data dan informasi tentang SKPD yang bersangkutan, kondisi pelayanan SKPD, gambaran visi dan misi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta rencana pembangunan SKPD untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD oleh SKPD. Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renstra SKPD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di SKPD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Begitu pula dengan SKPD Kecamatan, diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang tidak bertentang dengan RPJMD Kabupaten Temanggung. Renstra merupakan pedoman bagi SKPD dalam hal ini kecamatan dalam melaksanakan semua program dan kegiatan.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi  proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan,  adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan  pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tembarak Tahun 2014 – 2018 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Tembarak mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Temanggung sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Tembarak dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis ( Renstra ) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja SKPD ( Renja SKPD ) yang berlaku satu tahunan.

Renstra SKPD tahun 2014 sampai dengan 2018 Kecamatan Tembarak disusun dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah secara efektif, efisien dan berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan perangkat daerah dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Renstra tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 serta dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tahun 2014 sampai dengan 2018.

Proses penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung disusun dengan tahapan dan serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1. **Pengolahan data dan informasi**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renstra Kecamatan Tembarak diperoleh dari semua Sekretaris Kecamatan, para kepala seksi, para kasubbag dan staf Kecamatan Tembarak. Data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Kecamatan Tembarak, yang menyangkut aspek:

1. Kondisi pelayanan Kecamatan Tembarak;
2. Struktur Organisasi Kecamatan Tembarak;
3. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Kecamatan Tembarak.
4. **Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Tembarak**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak adalah:

1. Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi;
2. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Kecamatan Tembarak untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
4. Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak;
5. **Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Tembarak tahun sebelumnya**

Review hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut;
5. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Kecamatan Tembarak dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RenstraKecamatan Tembarak tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Kecamatan Tembarak;
3. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Kecamatan Tembarak sampai dengan tahun berjalan
4. **Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Tembarak sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Tembarak.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

* + - 1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak.
      2. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tembarak.
      3. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

1. **Perumusan tujuan dan sasaran**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Tembarak.

1. **Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak.

1. **Perumusan kegiatan prioritas**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya*,* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak.

Renstra-SKPD atau Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

* 1. **LANDASAN HUKUM**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung tahun 2011 – 2031;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung.
38. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 di susun dengan maksud :

* + - Memberikan arah pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung
    - Menjadi acuan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Rencana Strategis Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 disusun dengan tujuan :

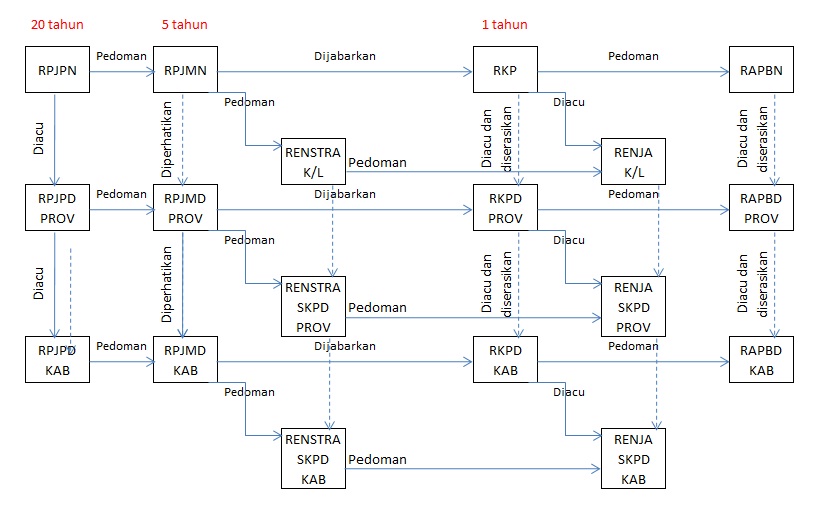
* Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam rangka Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan lingkungan, masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera dengan Pemerintahan Yang Bersih melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif;
* Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung

1. **HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Strategis Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 di susun dengan memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018.

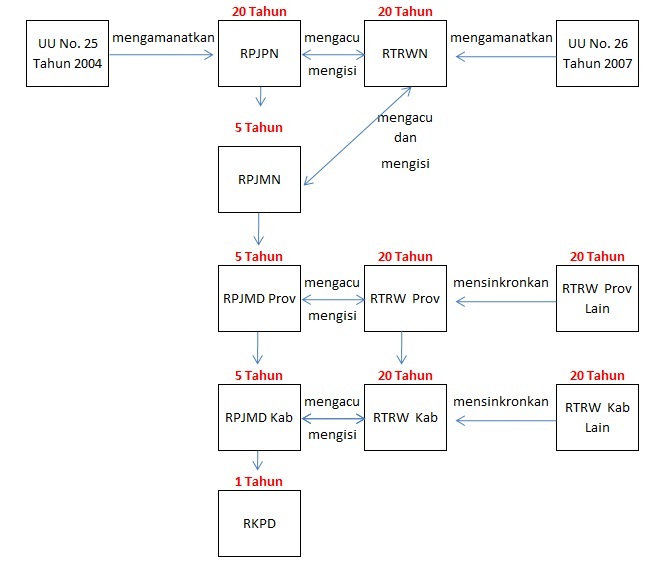
Disamping itu penyusunan Renstra Kecamatan Tembarak juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2013, terutama dari sisi pola dan Struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Temanggung.

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

****

**Gambar 1.1**

Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

****

**Gambar 1.2**

Hubungan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 terdiri dari 7 ( tujuh ) bab. Secara garis besar sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya serta maksud dan tujuan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEMBARAK**

Bagian ini memaparkan Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Tembarak, Sumber daya Kecamatan Tembarak, Kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak, Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Kecamatan Tembarak.

**BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian ini memaparkan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tembarak, Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung, Telaah Renstra Provinsi Jawa Tengah, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bagian ini menjelaskan Visi dan Misi Kecamatan Tembarak tahun 2014 - 2018 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Kecamatan Tembarak, strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan dari setiap strategi terpilih.

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bagian ini memaparkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.

**BAB VI INDIKATOR KINERJA**

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Tembarak pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah terpilih, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai

**Bab VII PENUTUP**

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEMBARAK**

1. **TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TEMBARAK**

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tembarak telah diatur dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, yaitu sebagai berikut :

1. Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang meliputi :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Camat dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di kecamatan;

b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;

d. Pengoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas lingkungan kecamatan;

e. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatalaksanaan dan rumah tangga kecamatan;

f. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;

g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di kecamatan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas :

a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas :

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum mempunyai tugas :

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan mempunyaintugas :

a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;

d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan mempuyai tugas :

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan adminsitrasi desa dan/atau kelurahan;

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan mempunyai tugas :

a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

a. Perijinan;

b. Rekomendasi;

c. Koordinasi;

d. Pembinaan;

e. Pengawasan;

f. Fasilitasi;

g. Penetapan;

h. Penyelenggaraan;

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

1. Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat yang meliputi koordinasi, pengendalian, perencanaan, pengelolaan, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pemerintahan daerah di wilayah kecamatan, sedangkan Fungsi Sekretaris Camat adalah :

a. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan dan pelayanan data;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan;

f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat.

3. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan kecamatan.

4. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian kecamatan.

6. Seksi Tata Pemerintahanmempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa, sedangkan fungsinya adalah :

a. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;

b. Pengoordinasian teknis operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah kerjanya;

c. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD );

d. Fasilitasi dan pengoordinasian pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

e. Penilaian atas laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa.

f. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;

g. Fasilitasi penataan desa/kelurahan;

h. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;

i. Penyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;

j. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;

k. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

l. Pertimbangan pengangkatan Lurah;

m. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemerintah desa dan kelurahan

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembangunan dibidang perekonomian kecamatan, produksi dan distribusi bahan makanan/kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :

a. Fasilitasi dan koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;

b. Fasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;

c. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan;

e. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;

f. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

g. Penggoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

8. Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja, sedangkan fungsinya adalah :

a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;

b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;

c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat ( LINMAS ) di wilayah kerjanya;

e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;

f. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;

g. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

h. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;

i. Pemberian rekomendasi dan/atau perijinan tertentu

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

9. Tugas Seksi Kesejahteraan Masyarakatadalah mengoordinasikan penyusunan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, sedangkan fungsinya adalah :

a. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar;

b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;

c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;

d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;

e. Penyelenggaraan keluarga berencana;

f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;

g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;

h. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM );

i. Penanggulangan masalah sosial;

j. Fasilitasi kegiatan keagamaan dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temangung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, dengan bagan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tembarak

Camat

Sekcam

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubag Perencanaan

Kasubag Keuangan

Kasi

Kesmas

Kasi

Trantibum

Kasi

Tapem

Kasi

PMD

1. **SUMBER DAYA KECAMATAN TEMBARAK**

Sumber daya Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak meliputi data sumber daya manusia dan aset barang / gedung yang dimiliki Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung.

* + 1. **Sumber Daya Manusia**

Jumlah kepegawaian/SDM Kecamatan Tembarak sebanyak 30 orang dengan perincian dalam :

**Tabel 2.1**

Jumlah Pegawai Kecamatan Tembarak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah pegawai | Keterangan |
| 1  2  3  4 | Kualifikasi Pendidikan   * + - 1. SD       2. SMP       3. SMA       4. Sarjana Muda ( DIII )       5. S1 / D IV       6. S2   Jumlah  Pangkat / Golongan  a. Gol I  b. Gol II  c. Gol III  d. Gol IV  Jumlah  Jabatan   1. Eselon II 2. Eselon III 3. Eselon IV 4. Eselon V 5. Staf Umum   Jumlah  Jenis Kelamin  a. Laki – laki  b. Perempuan  Jumlah | 3  2  20  0  4  1  30  4  12  12  2  30  -  2  7  -  21  30  24  6  30 |  |

* + 1. **Sumber Daya Selain Manusia**

Berikut ini tabel sumber daya selain manusia di Kecamatan Tembarak:

**Tabel 2.2**

Kendaraan Dinas yang dimiliki Kecamatan Tembarak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis | Kondisi | Jumlah |
| 1  2 | Sepeda Motor  Mobil | Baik  Baik | 6  1 |

**Tabel 2.3**

Perlengkapan/peralatan kantor yang dimiliki Kecamatan Tembarak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Barang | Jumlah | Kondisi |
| 1 | Meja Kerja Pejabat Eslon III | 2 | Baik |
| 2 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 2 | Baik |
| 3 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 7 | Baik |
| 4 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 7 | Baik |
| 5 | Meja Kerja Staf | 7 | Baik |
| 6 | Kursi Kerja Staf | 7 | Baik |
| 7 | Meja dan Kursi Tamu | 2 | Baik |
| 8 | Meja Rapat | 10 | Baik |
| 9 | Kursi Rapat | 60 | Baik |
| 10 | Kursi pelayanan | 3 | Baik |
| 11 | Komputer | 3 | Baik |
| 12 | Meja Komputer | 6 | Baik |
| 13 | Laptop | 1 | Baik |
| 14 | Printer | 3 | Baik |
| 15 | Proyektor | 1 | Baik |
| 16 | Sound System | 1 | Baik |
| 17 | Filling Cabinet | 6 | Baik |
| 18 | HT | 1 | Baik |
| 19 | Lemari Kayu | 5 | Baik |
| 20 | Rak Kayu | 1 | Baik |
| 21 | Televisi | 2 | Baik |
| 22 | Telepon | 1 | Baik |
| 23 | Papan informasi | 2 | Baik |
| 24 | UPS | 0 | Baik |
| 25 | White board | 1 | Baik |
| 26 | Tangga | 0 | Baik |
| 27 | Gordyn/Gorden/Korden | 14 | Baik |
| 28 | Tempat Sampah | 4 | Baik |
| 29 | Kompor gas | 1 | Baik |
| 30 | Tabung Gas | 1 | Baik |
| 31 | Meja Kursi rumah dinas | 0 | Baik |
| 32 | Kasur | 1 | Baik |
| 32 | Rak Piring | 1 | Baik |

**Tabel 2.4**

Bangunan Kecamatan Tembarak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis | Kondisi | Luas (m²) |
| 1 | Gedung Kantor | Baik | 3320 |
| 2 | Rumah Dinas | Baik | 200 |
| 3 | Musholla | Baik | 200 |
| 4 | Tempat Parkir Kendaraan | Baik | 15 |
| 5 | Pagar Keliling Kantor Kecamatan | Baik | 270 |

* 1. **KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TEMBARAK**
     1. **Capaian Kinerja Kecamatan Tembarak Tahun 2009 – 2013**
     2. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temangggung berdasarkan rencana strategi Kecamatan Tembarak tahun 2009 – 2013 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tembarak sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.5**

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tembarak

Tahun 2009 – 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target Indikator Lainnya | Satuan | Target Renstra | | | | | Realisasi Capaian | | | | | Rasio Capaian | | | | | Ket. |
| Tahun-1 (2009) | Tahun-2 (2010) | Tahun-3 (2011) | Tahun-4 (2012) | Tahun-5 (2013) | Tahun-1 (2009) | Tahun-2 (2010) | Tahun-3 (2011) | Tahun-4 (2012) | Tahun-5 (2013) | Tahun-1 (2009) | Tahun-2 (2010) | Tahun-3 (2011) | Tahun-4 (2012) | Tahun-5 (2013) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Terbinanya UKS/LSS |  | SD/MI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Persiapan E-KTP |  | Bulan | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam rangka pelaksanaan Simswakarsa |  | desa\* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Terbinanya Hansip/Linmas di Desa-desa |  | desa\* | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Terbinanya Kerukunan Antar Umat Beragama |  | desa\* | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |  | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 94,28 | 95.44 | 83.53 | 98.38 | 99.99 |  |
| 7 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor |  | Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.67 |  |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor |  | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Penyediaan alat tulis kantor |  | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |  | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89.09 |  |
| 11 | Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor |  | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan |  | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 93,33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 100 |  |
| 13 | Penyediaan makan dan minum |  | Bulan | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 98,16 | 96.16 | 96.77 | 97.78 | 90.86 |  |
| 14 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah |  | Bulan | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88.89 |  |
| 15 | Penyediaan honorarium pegawai honorer |  | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 44,4 | 100 | 100 | 100 | 99.6 |  |
| 16 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor |  | Unit | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 |  |
| 17 | Pengadaan peralatan gedung kantor |  | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 97.85 | 100 | 0 |  |
| 18 | Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas |  | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |  | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 20 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas |  | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 98.98 | 98.4 | 99.38 | 100 |  |
| 21 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor |  | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 |  |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |  | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 49.07 | 100 |  |
| 23 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu |  | Paket | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |
| 24 | Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah |  | desa\* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 25 | Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes |  | desa\* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 26 | Fasilitasi kegiatan ADD |  | desa\* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.95 |  |
| 27 | Penyelenggaraan PATEN |  | Bulan | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 28 | Fasilitasi pengisian kades dan perdes |  | Desa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 29 | Rapat koordinasi kades dan perdes |  | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100 | 99.87 | 99.67 | 100 | 100 |  |
| 30 | Inventarisasi tanah bengkok |  | Bulan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Pemberdayaan kelembagaan desa |  | desa\* | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 98.67 |  |
| 32 | Pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan |  | desa\* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 92.5 | 100 | 100 | 100 |  |
| 33 | Pendampingan desa binaan |  | Desa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa |  | Desa | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Fasilitasi PWK |  | Desa | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 36 | Fasilitasi Pendampingan PNPM-MD |  | Desa | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 37 | Fasiliasi penyusunan profil desa/kelurahan |  | Desa | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99.83 |  |

Dari tabel diatas diketahui keberhasilan hampir semua indikator tercapai sampai pada tahun 2013, hal ini dipengaruhi oleh keberhasilan Kecamatan Tembarak dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan peningkatan pelayanan umum pemerintahan. Sedangkan satu indikator yang gagal yaitu indikator Prosentase desa yang tepat waktu dalam pelunasan PBB dan Prosentase pelunasan PBB dikarenakan berbarengan dengan musim tanam tembakau sehingga uang yang seharusnya untuk membayar PBB digunakan untuk modal menanam tembakau .

1. **Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Tembarak Tahun 2009 – 2013**

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Tembarak melalui pelaksanaan renstra Kecamatan Tembarak tahun 2009-2013 untuk mengindentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut pada tabel 2.6

**Tabel 2.6**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Tembarak

Tahun 2009 - 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD** | **Anggaran pada** | | | | | **Realisasi Tahun ke-** | | | | | **Rasio Capaian pada** | | | | | **Rata-rata Pertumbuhan** | |
| Tahun- 1 (2009) | Tahun-2 (2010) | Tahun-3 (2011) | Tahun-4 (2012) | Tahun-5 (2013) | Tahun- 1 (2009) | Tahun-2 (2010) | Tahun-3 (2011) | Tahun-4 (2012) | Tahun-5 (2013) | Tahun- 1 (2009) | Tahun-2 (2010) | Tahun-3 (2011) | Tahun-4 (2012) | Tahun-5 (2013) | Anggaran | Realisasi |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 | Terbinanya UKS/LSS | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | Persiapan E-KTP | - | - | - | 11.500.000 | - | - | - | - | 11.500.000 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam rangka pelaksanaan Simswakarsa | 13.200.000 | 13200.000 | 13.200.000 | 18.000.000 | 24.720.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 18.000.000 | 24.720.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16.464.000 | 16.464.000 |
| 4 | Terbinanya Hansip/Linmas di Desa-desa | 4.000.000 | 1.300.000 | 1300.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.120.000 | 2.120.000 |
| 5 | Terbinanya Kerukunan Antar Umat Beragama | 1.820.000 | 800.000- | 800.000 | 1..000.000 | 1.000.000 | 1.795.000 | 800.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.084.000 | 1.079.000 |
| 6 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 8.460.000 | 6.950.000. | 6.120.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 6.601.745 | 6.800.063 | 5.767.532 | 5.221.669 | 8.127.533 | 78,03 | 97,84 | 94,24 | 80,33 | 85,55 | 7.506.000 | 6.503.708 |
| 7 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | - | - | 15.000.000 | - | - | - | - | 14.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,67 | 3.000.000 | 2.990.000 |
| 8 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 3..000.000 | .2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 3..000.000 | 2.340..000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.963.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 3.000.000 | 2.960.600 |
| 9 | Penyediaan alat tulis kantor | 5.591500 | 5.591.000 | 5.591.000 | 5.500.000 | 5.000.000 | 5.591.500 | 5.591.000 | 5.591.000 | 5.500.000 | 5.000.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.454.600 | 5.454.600 |
| 10 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 3.632.500 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.925.000 | 3.632.500 | 3.500.000 | 3.999.925 | 3.995.000 | 1.715.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,09 | 3.411.500 | 3.368.485 |
| 11 | Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 750.000 | 750..000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 850..000 | 850.000 |
| 12 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 888.000 | 888.000 | 888.000 | 888.000 | 900.000 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 98,93 | 900.000 | 890,4000 |
| 13 | Penyediaan makan dan minum | 7.042.000 | 6.000.000 | 7.750.000 | 7.750.000 | 12.770.000 | 7.037.500 | 6.000.000 | 7.745.500 | 7.750.000 | 11.602.400 | 99,93 | 100 | 96,77 | 99,94 | 90,85 | 8,262,400 | 8,027,080 |
| 14 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | - | - | - | 7.200.000 | 16.200.000 | - | - | - | 7.200.000 | 14.400.000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88,88 | 4,680,000 | 4,320.000 |
| 15 | Penyediaan honorarium pegawai honorer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 2.610.000 | 5.500.000 | 0 | 7.000.000 | 30.000.000 | 2.610.000 | 5.500.000 | 0 | 7.000.000 | 28.998.000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 96.66 | 9.022.000 | 8.821.600 |
| 17 | Pengadaan peralatan gedung kantor | 1.350.000 | 1.785.000 | 8.500.000 | 0 | 15.000.000 | 1.350.000 | 1.785.000 | 8.500.000 | 0 | 15.000.000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.327..000 | 5.327.000 |
| 18 | Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 19 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 4.394.500 | .7500.000 | 7.000.000 | 6.500.000 | 1.000.000 | 4.364.500 | 7.480.000 | 6.992.000 | 6.500.000 | 1.000.000 | 99,31 | 99,73 | 99,88 | 100 | 0 | 5.278.900 | 5267.300 |
| 20 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas | 11,200,000 | 9.926.500 | 10.000.000 | 12.500.000 | 16.000.000 | 11.299.000 | 9.924.000 | 9.997.700 | 10.244.270 | 14.862.615 | 100 | 99,97 | 99.97 | 81,95 | 92.89 | 11.925.300 | 9,280,717 |
| 21 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 2.420..000 | 1.350.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 2.000.000 | 2.420.000 | 1.350.000 | 1.750.000 | 1.461.000 | 1.000.000 | 100 | 100 | 100 | 83,48 | 50 | 1.854..000 | 1.596.200 |
| 23 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 0 | 2.160.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1.980.000 | 0 | 2.400.000 | - | 0 | 92.12 | 0 | 48 | 0 | 1.432..000 | 876..000 |
| 24 | Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | 7.960.000 | 7.833.500 | 7.685.496 | 8.000.000 | 27.679.000 | 6,072.200 | 7.833.500 | 7.682.000 | 7.842.000 | 27.365.000 | 76,28 | 100 | 99.95 | 98 | 98,86 | 11.831.599 | 11.358.940 |
| 25 | Fasilitasi dan evaluasi Perdes tentang APBDes | 3.250.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.155.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 97,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.890.000 | 1.871.000 |
| 26 | Fasilitasi kegiatan ADD | 6.500.000 | 3.584.000 | 3.900.000 | 3.250.000 | 5.200.000 | 6.230.000 | 3.559.000 | 3.900.000 | 3.250.000 | 5.200.000 | 95,84 | 99,30 | 100 | 100 | 100 | 4.486.800 |  |
| 27 | Penyelenggaraan PATEN | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.500.000 | 14.996.000 | 0 | 0 | 0 | 96,66 | 99,97 | 6.000.000 | 5.899.200 |
| 28 | Fasilitasi pengisian kades dan perdes | 1.680.000 | 800.000 | 500.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 1.675.000 | 800.000 | 500.000 | 1.360.000 | 9.860.000 | 99,70 | 100 | 100 | 68 | 98,6 | 2.996.000 | 2.839.000 |
| 29 | Rapat koordinasi kades dan perdes | 3.250.000 | 1.500.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 5.000.000 | 3.235.000 | 1.500.000 | 2.750.000 | 2.520.000 | 4.990.000 | 99,53 | 100 | 100 | 91,63 | 100 | 3.050.000 | 2.999.000 |
| 30 | Inventarisasi tanah bengkok | 3.250.000 | 0 | 0 | 0 | - | 3.169.500 | 0 | 0 | 0 | - | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 633.900 |
| 31 | Pemberdayaan kelembagaan desa | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan | 3.705.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 3.705.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.341.000 | 3.341.000 |
| 33 | Pendampingan desa binaan | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 980.000 | 1.490.000 | 1.320.000 | 1.500.000 | 100 | 98 | 99,33 | 88 | 100 | 1.500.000 | 1.458.000 |
| 34 | Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 4.000.000 | 0 | - | - | 2.500.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 35 | Fasilitasi PWK | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.900.000 | 5.000.000 | - | 5.997.500 | 6.000.000 | 3.900.000 | 5.000.000 | 0 | 99,95 | 100 | 100 | 100 | 4.180..000 | 4.179.500 |
| 36 | Fasilitasi Pendampingan PNPM-MD | 0 | 0 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | 0 | 3.900.000 | 3.899.500 | 3.900.000 | 0 | 0 | 100 | 99,98 | 100 | 2.340.000 | 2.339.900 |
| 37 | Fasiliasi penyusunan profil desa/kelurahan | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1.120.000 | 1.120.000 |

Dari tabel diatas terlihat rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2009 – 2013 terlihat cukup stabil hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran di Kecamatan Tembarak.

* 1. **TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN TEMBARAK**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tembarak tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

1. Tantangan
2. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
3. Kurang mampu menyerap anggaran karena keterlambatan penetapan APBD;
4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
5. Belum tersedianya data/informasi statistik untuk perencanaan pembangunan;
6. Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam bidang perencanaan;
7. Belum optimalnya pelayanan publik;
8. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Goverment*);
10. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
11. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.
12. Peluang
13. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota, RPJMN dan RPJMD
14. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
15. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
16. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
17. Adanya berbagai pelatihan yang berkaitan dengan penguasaan aplikasi komputer yang berkaitan dengan pelaporan, keuangan maupun barang;
18. Adanya desk dalam setiap perencanaan pembangunan daerah;
19. Adanya pembinaan aparatur kecamatan dari tingkat kabupaten.

**BAB III**

**ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

1. **Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tembarak**

Untuk mengidentifikasi permasalahan umum yang dihadapi oleh Kecamatan Tembarak dengan menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. **Analisis Lingkungan Internal**
2. **Faktor Kekuatan ( *Strong* )**
3. Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Temanggung tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kecamatan Tembarak;
4. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
5. Pola kerja di Kecamatan Tembarak yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
6. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural lainnya sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
7. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;
8. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.
9. **Faktor Kelemahan ( *Weakness* )**
10. Terbatasnya pegawai di SKPD Kecamatan Tembarak;
11. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
12. Belum adanya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
13. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan.  Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
14. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
15. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
16. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
17. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
18. **Analisis Lingkungan Eksternal**
19. **Faktor Peluang ( *Opportunity* )**
20. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah tertata dengan baik;
21. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Tembarak;
22. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
23. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
24. Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
25. Ditetapkannya Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
26. **Faktor Ancaman ( *Threat* )**
27. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
28. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
29. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir  dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Tembarak;
30. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan umum yang dihadapi oleh Kecamatan Tembarak sebagaimana tersebut pada tabel 3.1

**Tabel 3.1**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kecamatan Tembarak

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
| INTERNAL | EKSTERNAL |
| (KEWENANGAN SKPD) | (DILUAR KEWENANGAN SKPD) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Sumber Daya Manusia | Tingkat kehadiran karyawan yang 100% setiap harinya, ini menunjukkan dedikasi yang tinggi karyawan Kecamatan Tembarak |  | Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi | Masih banyak perangkat desa yang belum mengetahui tupoksinya masing-masing | Terbatasnya pegawai di SKPD Kecamatan Tembarak |
|  | Kecamatan Tembarak ditunjang oleh SDM yang cukup yaitu 1 orang lulusan S2, 3 orng lulusan S1, dan 8 orang lulusan SMA |  | Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi | Masih banyak perangkat desa yang pendidikannya hanya SD/SMP sehingga kinerjanya masih belum maksimal | Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis |
| Sarana Prasarana | Sarana dan prasarana sudah cukup memadai |  | Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan | Tiap dinas sudah mempunyai gedung sendiri sehingga kinerja karyawan bisa lebih efektifitas dan effisien | Belum adanya pelatihan berkelanjutan bagi tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan |
| Faktor Geografis | Karena terletak di lereng gunung sehingga jalan banyak menanjak dan berliku-liku |  | Jalan yang menanjak dan berliku-liku belum diaspal sehingga membahayakan keselamatan | Tidak adanya angkutan yang sampai ke Kecamatan Tembarak sehingga masyarakat dalam pelayanan kurang maksimal | Dengan adanya angkutan umum yang tidak sampai ke Kecamatan Tembarak maka karyawan harus mempunyai kendaraan sendiri sehinggga menanmbah pengeluaran untuk kredit/ membeli kendaraan bermotor |
| Sosial Budaya | Penduduk yang mayoritas adalah petani tembakau maka ketika masa panen tiba, pelayanan ti tingkat desa seringkai tersendat/ tidak berjalan sebagaimana mestinya. |  | Pola kerja di Kecamatan Tembarak yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif | Masih adanya perangkat desa yang mata pencahariannya selain menjadi perangkat juga di bidang pertanian sehingga di waktu panen mengganggu aktifitas kerja | Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan |
|  |  |  | Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural lainnya sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman | Karyawan yang bekerja di Tembarak sebagian besar berasal dari luar Tembarak sehingga masing-masing karyawan mempunyai adat dan kebiasaan sendiri-sendiri yang kadangkala membuat ketidak cocokan antar karyawan. | Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan |

1. **Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih**

**VISI** Kabupaten Temanggung tahun 2014 – 2018 :

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

**Daerah agraris berwawasan lingkungan** merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekoNomormi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekoNomormian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

**Masyarakat Agamis** merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan Norma-Norma agama.

**Berbudaya** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

**Sejahtera** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekoNomormi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

**Pemerintahan yang bersih** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

**MISI Kabupaten Temanggung tahun 2014 – 2018**

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari : keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

**“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”**

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

**Tabel 3.2**

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Tembarak

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VISI : | Terwujudnya Temanggung sebagai daerah agraris berwawasan lingkungan, memiliki masyarakat agamis, berbudaya, dan sejahtera dengan pemerintahan yang bersih | | | |
| No | Misi dan Program | Permasalahan Pelayanan Kec. Tretep | Faktor | |
| KDH dan Wakil KDH terpilih | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Misi 1. Mewujudkan peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan |  |  |  |
|  | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan | Masih banyak Keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan dan terbatasnya personil SDM di SKPD | Kualitas raskin yang rendah dan masih ada orang kaya yang menginginkan beras raskin dibagi rata | Adanya satgas raskin dan pengedropan beras raskin sudah tepat waktu |
| 2 | Misi 2. Mewujudkan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang agamis dan berbudaya |  |  |  |
|  | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan | Terbatasnya personil SDM di SKPD | Belum optimalnya kinerja dari pengurus PKK | Adanya pelatihan kader/ pengurus PKK |
|  | Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | Terbatasnya personil SDM di SKPD | Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian | Adanya koordinasi antara Aparat Desa/Kelurhan, tokoh masyarakat dengan Kecamatan dan Dinas/Instansi terkait |
|  | Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | Terbatasnya personil SDM di SKPD | Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pencegahan bencana alam | Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan koordinasi antara pihak-pihak maupun Dinas/Instansi terkait |
|  | Program Pengembangan Nilai Keagamaan | Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait dan terbatasnya anggaran | Terbatasnya anggaran | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
|  | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Terbatasnya personil SDM di SKPD dan anggaran | SDM lembaga yang belum menguasai peraturan perundangan | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
|  | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan | Terbatasnya personil SDM di SKPD dan anggaran | Peran serta masyarakat masih kurang, perencanaan di tangan pemerintah desa | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
|  | Program pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan | Terbatasnya personil SDM di SKPD dan anggaran | Belum terkoordinasinya kegiatan kepemudaan | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
| 3 | Misi 3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan dan perkotaan yang layak dan berwawasan lingkungan |  |  |  |
|  | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Terbatasnya personil SDM di SKPD | Kurangnya pemahaman tentang pelestarian lingkungan hidup | Adanya koordinasi yang baik antara Dinas/Instansi terkait |
| 4 | Misi 4. Mewujudkan peningkatan pendidikan yang berkualitas tanpa meninggalkan kearifan lokal |  |  |  |
|  | Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun | Terbatasnya personil SDM di SKPD dan anggaran | Kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan | Adanya koordinasi yang baik antara Dinas/Instansi terkait |
| 5 | Misi 5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan |  |  |  |
|  | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Terbatasnya personil SDM di SKPD dan anggaran | Belum membudayanya pola hidup sehat | Adanya koordinasi yang baik antara Dinas/Instansi terkait |
| 6 | Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik |  |  |  |
|  | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Terbatasnya personil SDM di SKPD | Data yang tidak akurat | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Terbatasnya personil SDM di SKPD | Perencanaan pembangunan hanya sebatas formalitas | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
|  | Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah | Terbatasnya personil SDM di SKPD | Data yang tidak akurat | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
|  | Program pelayanan administrasi perkantoran | Terbatasnya anggaran | Adanya beberapa usulan program yang tidak terdanai | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
|  | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Terbatasnya anggaran | Adanya beberapa usulan program yang tidak terdanai | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
|  | Program peningkatan disiplin aparatur | Terbatasnya anggaran | Terbatasnya personil SDM | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
|  | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Terbatasnya personil SDM di SKPD | Kurang pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
|  | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | Terbatasnya anggaran | Sarana dan prasarana belum memadai | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
|  | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Terbatasnya personil SDM di SKPD | Kurang pemahaman terhadap pengelolaan keuangan desa | Adanya UU, Perpu, Perda, Perbup |
|  | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa | Terbatasnya personil SDM di SKPD dan anggaran | Belum optimalnya kinerja dari perangkat Desa | Adanya pelatihan manajemen bagi perangkat desa |

* 1. **Telaahan Renstra K/L dan Pelayanan Kecamatan Tembarak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Tembarak ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

* + - * 1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
        2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
        3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
        4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
  1. **Penentuan Isu – isu Strategis**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu-isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan dan kelurahan serta beberapa jabatan struktural di tingkat kelurahan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
6. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*);
7. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
8. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai dengan seharusnya sehingga masih sering terjadi ketidakpastian kewenangan;
10. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik *hardware*, *software* maupun *brainware;*
11. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.
12. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penangulangan bencana di daerah bencana.

**Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan**

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Tembarak saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Tembarak.

**1.**   **Kondisi Yang Diinginkan**

1. Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural di kelurahan maupun jabatan fungsional umum di kecamatan dan kelurahan;
3. Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;
4. Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :
5. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*).
7. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
8. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan
9. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik.
10. Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

**2.**   **Proyeksi Kedepan Kecamatan Tembarak**

1. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.
2. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan.
4. SKPD Kecamatan sebagai tangan panjang Bupati di wilayah harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

* 1. **Visi dan Misi Kecamatan Tembarak**

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Pernyataan Visi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah **”Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, Dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih”.**

Penjelasan dari pernyataan visi adalah sebagai berikut :

**Daerah agraris berwawasan lingkungan** merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

**Masyarakat Agamis** merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan Norma-Norma agama.

**Berbudaya** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

**Sejahtera** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekoNomormi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

**Pemerintahan yang bersih** merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan Misi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

**Misi 1.** Mewujudkan peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan

**Misi 2.** Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;

**Misi 3.** Mewujudkan infrastruktur permukiman perdesaan dan perkotaan yang layak dan berwawasan lingkungan;

**Misi 4.** Mewujudkan peningkatan pendidikan yang berkualitas tanpa meninggalkan kearifan lokal

**Misi 5.** Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan

**Misi 6.** Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sector, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

**“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”**

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

* 1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tembarak**

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menanggani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Tembarak adalah :

* + - 1. **Misi 1**

Mewujudkan peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan

**Tujuan** : Meningkatkan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

**Sasaran** : Meningkatnya ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

* + - 1. **Misi 2**

Mewujudkan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang agamis dan berbudaya.

**Tujuan** :

1. Meningkatkaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan, dan ketertiban;
3. Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana;
4. Meningkatnya kualitas iman dan taqwa;
5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan;
6. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga.

**Sasaran** :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak;
2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan;
3. Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana;
4. Meningkatnya kualitas iman dan taqwa;
5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan;
6. Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga.
   * + 1. **Misi 3**

Mewujudkan infrastruktur permukiman perdesaan yang layak dan berwawasan lingkungan.

**Tujuan** : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

**Sasaran** : Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.

* + - 1. **Misi 4**

Mewujudkan peningkatan pendidikan yang berkualitas tanpa meninggalkan kearifan lokal

**Tujuan** : Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas pelayanan pendidikan

**Sasaran** : Meningkatnya aksebilitas pendidikan dasar

* + - 1. **Misi 5**

Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan.

**Tujuan** : Meningkatkan penyehatan lingkungan.

**Sasaran** : Meningkatnya perilaku hidup sehat.

* + - 1. **Misi 6**

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik

**Tujuan** :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daer;
3. Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
4. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
5. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

**Sasaran** :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
3. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tembarak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |  | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | |
| Kondisi awal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatkan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan | Meningkatnya ketahanan pangan pertanian/ perkebunan | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat |  |  |  |  |  |  |
|  | Lancarnya penyaluran Raskin kepada yang berhak | 13  desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
| 2 | Meningkatkaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak | Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) |  |  |  |  |  |  |
|  | Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | - | 6 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 3 | Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan, dan ketertiban | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan | Penurunan kasus SARA dan peningkatan partisipasi pemilih |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal | 13  desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
|  |  |  | Terbinanya anggota Hansip/ Linmas di Desa | 13  desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
|  |  |  | Meningkatnya kondusifitas wilayah dan meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilukada | - | - | - | - | - | 13 desa |
| 4 | Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana | Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana | Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam |  |  |  |  |  |  |
|  | Sosialisasi pencegahan bencana alam | - | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
| 5 | Meningkatnya kualitas iman dan taqwa | Meningkatnya kualitas iman dan taqwa | Cakupan fasilitasi pelaksanaan tri kerukunan umat beragama dan cakupan fasilitasi pelaksanaan peribadahan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terciptanya kerukunan antar umat beragama | 13  desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
|  |  |  | Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan | - | - | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
| 6 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan | Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam teknologi tepat guna, persentase menurunnya rumah tangga sasaran |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Meningkatnya kuantitas/kuali-tas kelembagaan Desa | 13  desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
|  |  |  | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa | 1 desa | 1 desa | 1 desa | 1 desa | 1 desa | 1 desa |
|  |  |  | Terlaksananya kegiatan program PWK dalam rangka percepatan pembangunan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Terlaksananya kegiatan PNPM-MP Perdesaan dalam rangka percepatan pembangunan | 13  desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
|  |  |  | Cakupan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan persentase partisipasi rumah tangga sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa/ Kelurahan dan tingkat Kecamatan | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
|  |  |  | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif | 13  desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
|  |  |  | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang partisipatif | - | 13 desa | - | - | - | - |
| 7 | Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga | Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga | Meningkatnya pembinaan dan penyelenggaraan pembinaan kepemudaan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terlaksananya pembinaan kegiatan kepemudaan | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 8 | Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup | Cakupan kebersihan lingkungan desa/ kelurahan |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terciptanya kebersihan lingkungan desa/ Kelurahan | - | - | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
| 9 | Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas pelayanan pendidikan | Meningkatnya aksebilitas pendidikan dasar | Meningkatnya aksesibilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan pemberian bea siswa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan | - | - | - | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
| 10 | Meningkatkan penyehatan lingkungan | Meningkatnya lingkungan sehat | Cakupan penjaringan kesehatan siswa tingkat dasar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat di lingkungan Sekolah Dasar | 1 SD/MI | 1 SD/MI | 1 SD/MI | 1 SD/MI | 1 SD/MI | 1 SD/MI |
| 11 | Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya | Cakupan penertiban Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan persentase penanganan pengaduan masyarakat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil | - | - | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
| 12 | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah | Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah |  |  |  |  |  |  |
|  | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu | - | - | 19 dokumen | 19 dokumen | 19 dokumen | 19 dokumen |
| 13 | Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah | Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah | Besaran ketersediaan data statistik |  |  |  |  |  |  |
|  | Tersusunnya profil Desa/ Kelurahan | 13  desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
|  | Tersusunnya profil Kecamatan | - | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| 14 | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Meningkatnya kinerja penyelenggara-an pemerintahan daerah | Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan persiapan 17 agustusan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Tersedianya honorarium/  upah tenaga kerja dan uang lembur | 13 bulan | 13 bulan | 13 bulan | 13 bulan | 13 bulan | 13 bulan |
|  |  |  | Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | - | - | 2 set, 3 unit | 2 set, 40 unit | 3 set | 2 set, 8 unit |
|  |  |  | Tersedianya komputer PC/laptop | 1 unit | 4 unit | 2 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
|  |  |  | Tersedianya laptop untuk Subbag perencanaan | - | - | 1 unit | - | - | - |
|  |  |  | Tersedianya LCD/layar | - | - | 1 set | - | - | - |
|  |  |  | Tersedianya Kendaraan Dinas | - | 3 unit | 4 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit |
|  |  |  | Terpeliharanya rumah dinas | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Tersedianya perlengkapan rumah dinas | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/  Operasional | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | - | - | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan |
|  |  |  | Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terciptanya disiplin aparatur | - | 18 stel | - | 18 stel | - | 18 stel |
|  |  |  | Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah dan Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terpenuhinya target pendapatan daerah | 13  desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
|  |  | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  | Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| 15 | Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Cakupan Pembinaan Administrasi Desa |  |  |  |  |  |  |
|  | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 13  desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
|  |  |  | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 13  desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
| 16 | Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme | Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur | Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong dan Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa | 13  desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
|  |  |  | Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
|  |  |  | Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa |
|  |  |  | Terisinya kekosongan Anggota BPD | - | - | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13  desa |

* 1. **STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN TEMBARAK**

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Tembarak adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung tahun 2014 – 2018 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.2**

Strategi dan kebijakan Kecamatan Tembarak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VISI : Terwujudnya Temanggung sebagai daerah agraris berwawasan lingkungan, memiliki masyarakat agamis, berbudaya, dan sejahtera dengan pemerintahan yang bersih** | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| **Misi 1. Mewujudkan peningkatan pertanian modern yang berwawasan lingkungan** | | | |
| Meningkatkan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan | Meningkatnya ketahanan pangan pertanian/ perkebunan | Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan | Meningkatkan ketahanan pangan melalui pendampingan raskin |
| **Misi 2. Mewujudkan masyarakat perdesaan dan perkotaan yang agamis dan berbudaya** | | | |
| Meningkatkaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak | Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak | Meningkatkan upaya penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi |
| Meningkatkan kualitas kehidupan politik, wawasan kebangsaan, keamanan, dan ketertiban | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan | Peningkatan kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan | Meningkatkan kualitas kehidupan politik dan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pendidikan politik masyarakat dan penanganan penyakit masyarakat |
| Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana | Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana | Peningkatan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana alam | Meningkatkan upaya penanganan terhadap bencana alam |
| Meningkatnya kualitas iman dan taqwa | Meningkatnya kualitas iman dan taqwa | Peningkatan kualitas iman dan taqwa | Meningkatkan kualitas iman dan taqwa masyarakat melalui pembinaan kerukunan antar umat beragama dan memfasiliatsi kegiatan keagamaan |
| Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan | Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat | Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat |
| Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga | Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga | Peningkatan pembinaan kepemudaan dan olahraga | Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan |
| **Misi 3. Mewujudkan peningkatan infrastruktur permukiman perdesaan dan perkotaan yang layak dan berwawasan lingkungan** | | | |
| Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup | Peningkatan kelestarian lingkungan hidup | Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah |
| **Misi 4. Mewujudkan peningkatan pendidikan yang berkualitas tanpa meninggalkan kearifan local** | | | |
| Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas pelayanan pendidikan | Meningkatnya aksebilitas pendidikan dasar | Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar | Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan pemberian beasiswa |
| **Misi 5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan** | | | |
| Meningkatkan penyehatan lingkungan | Meningkatnya lingkungan sehat | Peningkatan lingkungan hidup | Meningkatkan lingkungan sehat melalui terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat di lingkungan SD/ MI |
| **Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik** | | | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya | Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya | Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya |
| Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah | Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif |
| Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah | Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah | Peningkatan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah | Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan setiap tahunnya |
| Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama pada sisi pemenuhan ketersediaan peraturan perundang-undangan, penanganan temuan pemeriksaan, ketepatan pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan |
|  | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah desa |
| Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah | Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah |  |  |
| Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme | Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur | Peningkatan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur | Meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur melalui diklat pegawai, meningkatnya pendidikan formal pegawai, dan pengisian jabatan struktural yang kosong |

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2014 – 2018 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Hibah
   1. Belanja hibah program PWK Prasarana Wilayah
   2. Belanja hibah program PWK Ekonomi
   3. Belanja hibah program PWK Seni Budaya
3. Belanja Langsung
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan
   1. Pendampingan program Raskin
5. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
   1. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
6. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
   1. Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
   2. Pembinaan Hansip/Linmas Desa
   3. Pemantauan kegiatan Pemilukada di tingkat Kecamatan
7. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
   1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
8. Program pengembangan nilai keagamaan.
   1. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan SKB 3 Menteri.
   2. Fasilitasi kegiatan keagamaan.
9. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa
   1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
   2. Fasilitasi kegiatan pendampingan Desa Binaan
   3. Fasilitasi Pagu Wilayah Kecamatan
   4. Pendampingan PNPM-MD
10. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
    1. Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan tingkat kecamatan
    2. Fasilitasi Penyusunan RKP Desa
    3. Fasilitasi penyusunan RPJMDes
11. Program pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan
    1. Fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan
12. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
    1. Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan
13. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
    1. Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan
14. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
    1. Kegiatan pembinaan UKS/LSS
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
    1. Fasilitasi administrasi kependudukan
16. Program perencanaan pembangunan daerah
    1. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD
17. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah
    1. Kegiatan fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil desa
18. Penyusunan profil kecamatan
19. Program pelayanan administrasi perkantoran
    1. Penyediaan jasa surat menyurat
    2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    3. Pelayanan jasa kebersihan kantor
    4. Penyediaan alat tulis kantor
    5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan
    8. Penyediaan makan dan minuman
    9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
    10. Jasa pelayanan perkantoran
20. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
    1. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
21. Pengadaan peralatan gedung kantor
22. Pengadaan kendaraan dinas
23. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
24. Pengadaan perlengkapan rumah dinas
25. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
26. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
27. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
29. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (parkir,gudang, pavingisasi, tempat baliho)
30. Program peningkatan Disiplin Aparatur
    1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
31. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
    1. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
32. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
    1. Fasilitasi dan verivikasi PATEN
33. Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kecamatan
34. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
    1. Kegiatan fasilitasi dan evaluasi perdes tentang APBDes.
    2. Kegiatan fasilitasi alokasi dana desa (ADD).
35. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
    1. Kegiatan fasilitasi pengisian Kades Perdes
    2. Kegiatan rapat koordinasi Kades dan Perdes
    3. Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa
    4. Fasilitasi pengisian anggota BPD dan pelantikan BPD antar waktu

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 5.1**

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tembarak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran |  | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Penanggung jawab | Lokasi |
| 2014 (sesuai APBD 2014) | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra (2018) | |
| target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp |
| 2 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | **Belanja Hibah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Belanja hibah Program PWK Prasarana Wilayah | Terlaksananya pemerataan pembangunan prasarana wilayah di kecamatan | desa | 1 | 1 | 498.000.000 | 1 | 333.000.000 | 1 | 366.300.000 | 1 | 402.930.000 | 1 | 443.223.000 | 5 | 2.043.453.000 |  | Desa yang mendapat alokasi PWK bidang praswil |
|  |  |  | - Belanja Hibah Program PWK Ekonomi | Terlaksananya peningkatan pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat | kelompok | 0 | 0 | - | 6 | 111000.000 | 6 | 122.100.000 | 6 | 134.310.000 | 6 | 13.431.000 | 24 | 380.841.000 |  | Desa yang mendapat alokasi PWK bidang ekonomi |
|  |  |  | - Belanja Hibah Program PWK Seni Budaya | Terlaksananya peningkatan, pengembangan, dan pelestarian seni budaya di masyarakat | kelompok | 0 | 0 | - | 7 | 48.000.000 | 7 | 52.800.000 | 7 | 58.080.000. | 7 | 63.888.000 | 24 | 445.536.000 |  | Desa yang mendapat alokasi PWK bidang seni budaya |
|  |  |  | **JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG** | |  |  |  | **498.000.000** |  | **492.000.000** |  | **541.200.000** |  | **595.320.000** |  | **520.542.000** |  | **2.869.830..000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **BELANJA LANGSUNG** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 1 |  |  | URUSAN KETAHANAN PANGAN | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan | Meningkatnya ketahanan pangan pertanian/ perkebunn |  | Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian / perkebunan | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Pendampingan Program Raskin | Lancarnya penyaluran Raskin kepada yang berhak menerima | desa |  | 13 | 3.000.000 | 13 | 2.200.000 | 13 | 2.420.000 | 13 | 2.640.000 | 13 | 2.860.000 | 65 | 13.120.000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 2 |  |  | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan pemberdayaan perempun, dan perlindungan anak | Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak | 1 | Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan | Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | bulan |  | 6 | 5.000.000 | 12 | 3.850.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.250.000 | 12 | 4.500.000 | 54 | 21.600.000 |  |  |
| Misi 2 |  |  | URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik, Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan Ketertiban | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan | 1 | Program pemeliharaan kantrantibman dan pencegahan tindah kriminal | Penurunan kasus SARA dan Peningkatan Partisipasi Pemilih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas | desa |  | 13 | 24.960.000 | 13 | 24.720.000 | 13 | 24.720.000 | 13 | 24.720.000 | 13 | 24.720.000 | 65 | 123.840.000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  | b | Pembinaan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan | Terbinanya anggota Hansip/Linmas di Desa/Kelurahan | desa |  | 13 | 3.500.000 | 13 | 4.875.000 | 13 | 4.875.000 | 13 | 4.875.000 | 13 | 4.875..000 | 65 | 23.000..000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  | c | Pemantauan Kegiatan Pemilukada di Tingkat kecamatan | Meningkatnya kondusifitas wilayah dan meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilukada | desa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.500.000 | 13 | 6.500.000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 2 |  |  | SOSIAL | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana | Meningkatnya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan bencana | 1 | Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam | Terpantaunya potensi terjadinya bencana alam dan pencegahannya | desa |  | 13 | 1.500.000 | 13 | 3.000.000 | 13 | 3000.000 | 13 | 3.000.000 | 13 | 3.000.000 | 65 | 13.500.000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 2 |  |  | URUSAN KEBUDAYAAN | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa | Meningkatnya kualitas iman dan taqwa |  | Program Pengembangan Nilai Keagamaan | Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tri Kerukunan Umat Beragama dan Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Peribadahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan SKB 3 Menteri | Terciptanya kerukunan antar umat beragama | desa |  | 13 | 2.000.000 | 13 | 2.600.000 | 13 | 2600.000 | 13 | 2.600.000 | 13 | 2.600.000 | 65 | 12.400.000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  | b | Fasilitasi Kegiatan Keagamaan | Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan | desa |  | - | 0 | 13 | 1.300.000 | 13 | 3.600.000 | 13 | 3.600.000 | 13 | 4.300.000 | 65 | 12.800.000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di13desa dalam 5 tahun |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 2 |  |  | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan |  | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna, Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan Desa/Kelurahan | desa |  | 13 | 3.900.000 | 13 | 3.900.000 | 13 | 3.900.000 |  | 3.900.000 | 13 | 3.900.000 | 65 | 19.500.000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  | b | Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan | desa |  | 1 | 2.500.000 | 1 | 3.480.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.500.000 | 5 | 20.980.000 |  |  |
|  |  | c | Fasilitasi Pagu Wilayah Kecamatan | Terlaksananya kegiatan Program PWK dalam rangka percepatan pembangunan | bulan |  | 12 | 5.000.000 | 12 | 3.480.000 | 12 | 3.450.000 | 12 | 3.450.000 | 12 | 3.450.000 | 60 | 18.830.000 |  |  |
|  |  | d | Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan/  Perkotaan (PNPM-MP) | Terlaksananya kegiatan PNPM-MP Perdesaan/  Perkotaan dalam rangka percepatan pembangunan | desa |  | 13 | 3.900.000 | 13 | 1.600.000 | 13 | 5.700.000 | 13 | 6.200.000 | 13 | 6800.000 | 65 | 24.200.000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan | Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan | Telaksananya Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan dan Tingkat Kecamatan | desa/kel |  | 13 | 6.000.000 | 13 | 6.450.000 | 13 | 6.400.000 | 13 | 7.000.000 | 13 | 7.700.000 | 65 | 33.550.000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  | b | Fasilitasi penyusunan RKP Desa | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif | desa |  | 0 | 0 | 13 | 2.600.000 | 13 | 2.600.000 | 13 | 2.600.000 | 13 | 2.600.000 | 52 | 10.400.000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  | c | Fasilitasi Penyusunan RPJMDes | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang partisipatif | desa |  | 13 | 2.500.000 | 13 | 6.500.000 | 13 | 6.400.000 | 13 | 7.000.000 | 13 | 7.700.000 | 65 | 30.100.000 |  |  |
| Misi 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga | Meningkatnya pembinaan kepemudaan dan olahraga |  | Program pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan | Meningkatnya pembinaan dan penyelenggaraan pembinaan kepemudaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Fasilitasi pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan | Terlaksananya pembinaan kegiatan kepemudaan | bulan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Misi 3 |  |  | LINGKUNGAN HIDUP | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembengunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup |  | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Cakupan kebersihan lingkungan desa/kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a | Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan Lingkungan | Terciptanya kebersihan lingkungan Desa/Kelurahan | desa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 4 |  |  | URUSAN PENDIDIKAN | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan aksesibilitas masyarakat atas pelayanan pendidikan | Meningkatnya aksebilitas pendidikan dasar |  | Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun | Meningkatnya aksesibibilitas pendidikan dasar melalui pengembangan pelayanan pendidikan dasar dan pemberian beasiswa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan | Terlaksananya lomba antar sekolah SD/MI se Kecamatan | kegiatan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 5 |  |  | URUSAN KESEHATAN | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan Penyehatan Lingkungan | Meningkatnya lingkungan sehat | 1 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Pembinaan UKS/LSS | Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat dilingkungan Sekolah Dasar | SD/MI |  | 1 | 2.000.000 | 1 | 1.600.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.750.000 | 1 | 3000.000 | 5 | 11.850.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 6 |  |  | URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya | 1 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan persentase penanganan pengaduan masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Fasilitasi Administrasi Kependudukan | Terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | desa |  | 13 | 4.500.000 | 13 | 800.000 | 13 | 5.500.000 | 13 | 6.000.000 | 13 | 6.500.000 | 65 | 23.300.000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 6 |  |  | URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah |  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Rasio Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu | dokumen |  | 0 | 0 | 19 | 750.000 | 19 | 2.500.000 | 19 | 3.000.000 | 19 | 4.000.000 | 76 | 10.250.000 |  |  |
|  |  |  |  | Renstra | dokumen |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Renja | dokumen |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Evaluasi Renja | dokumen |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Lakip | dokumen |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | LPPD | dokumen |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Lap. Perkembangan /RFK | dokumen |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 6 |  |  | URUSAN STATISTIK | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah | Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah |  | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | Besaran ketersediaan data statistik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa/kelurahan | Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan | desa/kel |  | 13 | 3.900.000 | 13 | 3.900.000 | 13 | 4.200.000 | 13 | 4.500.000 | 13 | 4.800.000 | 65 | 21.300.000 |  | Kondisi akhir merupakan akumulasi kegiatan di 13 desa dalam 5 tahun |
|  |  | b | Penyusunan Profil Kecamatan | Tersusunnya Profil Kecamatan | dokumen |  | 0 | 0 | 1 | 1.650.000 | 1 | 2.750.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.250.000 | 4 | 10.650.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misi 6 |  |  | URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BELANJA PENATA USAHAAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran | bulan |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.750.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.250.000 | 6 | 6.000.000 |  |  |
|  |  | b | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | bulan |  | 12 | 8.500.000 | 12 | 12.995.000 | 12 | 9.350.000 | 12 | 9.500.000 | 12 | 9.500.000 | 60 | 49.845.000 |  |  |
|  |  | c | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan | bulan |  | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 60 | 20.000.000 |  |  |
|  |  | d | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor | bulan |  | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 7.200.000 | 12 | 7.900.000 | 12 | 8.600.000 | 60 | 35.700.000 |  |  |
|  |  | e | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan | bulan |  | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.500.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.500.000 | 12 | 5.500.000 | 60 | 24.500.000 |  |  |
|  |  | f | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | bulan |  | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.400.000 | 12 | 2.600.000 | 12 | 2.800.000 | 60 | 11.800.000 |  |  |
|  |  | g | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | bulan |  | 12 | 960.000 | 12 | 1.200.000 | 12 | 1.100.000 | 12 | 1.200.000 | 12 | 1.300.000 | 60 | 5760.000 |  |  |
|  |  | h | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Keagamaan | bulan |  | 12 | 2500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 3.000.000 | 60 | 13.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai | bulan |  | 12 | 13.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 14500.000 | 12 | 15.950.000 | 12 | 17.500,.000 | 60 | 72.,950.000 |  |  |
|  |  | i | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap | bulan |  | 12 | 18.000.000 | 12 | 28.800.000 | 12 | 19.800.000 | 12 | 19.800.000 | 12 | 19.800.000 | 60 | 106.200.000 |  |  |
|  |  | j | Jasa Pelayanan perkantoran | Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan uang lembur | bulan |  | 12 | 5.250.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 6.200.000 | 12 | 6.800.000 | 12 | 7.500.000 | 60 | 37.450.000 |  |  |
|  |  | 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Kursi Rapat plastic | Unit |  | 0 | 0 | 50 | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  | 50 | 15.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - Kursi penghadapan camat | unit |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya penangkal petir | set |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - Kursi rapat stailensteel | unit |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - Meja kursi kerja pegawai | set |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - Meja kursi tamu sekcam | set |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - Kursi ruang tunggu pelayanan | unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | b | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya komputer PC/laptop | unit |  | 0 | 0 | 1 | 7.500.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 9.000.000 | 4 | 32.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya laptop untuk Subbag perencanaan | unit |  |  |  | 1 | 7.500.000 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7.500.000 |  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya LCD/layar | set |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | c | Pengadaan Kendaraan Dinas | Tersedianya Kendaraan Dinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Vixion | unit |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | - Mega Pro | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | d | Pemeliharaan Rutin/ berkala rumah dinas | Terpeliharanya rumah dinas | bulan |  | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 60 | 25.000.000 |  |  |
|  |  | e | Pengadaan perlengkapan rumah dinas | Tersedianya perlengkapan rumah dinas | bulan |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | f | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas | bulan |  | 12 | 1.000.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 1500.000 | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | 60 | 8.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | - Tralis |  |  |  |  | 12 | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  | 12 | 15.000.000 |  |  |
|  |  | g | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional | bulan |  | 12 | 17.000.000 | 12 | 16.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 22.500.000 | 12 | 24.500.000 | 60 | 100.000.000 |  |  |
|  |  | h | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | bulan |  | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 60 | 12.500.000 |  |  |
|  |  | i | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | bulan |  | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 12 | 2.500.000 | 60 | 12.500.000 |  |  |
|  |  | j | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Parkir | keg |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - Gudang | keg |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - Pavingisasi | keg |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | - Tempat baliho | keg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | Program peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Terciptanya disiplin aparatur | stel |  | 18 | 3.600.000 | 0 | 0 | 18 | 7.500.000 | 0 | 0 | 18 | 7.500.000 | 54 | 18.600.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah dan Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | Terpenuhinya target pendapatan daerah | desa |  | 13 | 30.000.000 | 13 | 27.679.000 | 13 | 30.000.000 | 13 | 30.000.000 | 13 | 30.000.000 | 65 | 147.679.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan | desa |  | 13 | 15.000.000 | 13 | 5.000.000 | 13 | 5.500.000 | 13 | 6.000.000 | 13 | 6.500.000 | 65 | 38.000.000 |  |  |
|  |  | b | Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan tingkat Kecamatan | Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan | bulan |  | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah |  | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa | Cakupan Pembinaan Administrasi Desa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Fasilitasi dan Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | desa |  | 13 | 2.500.000 | 13 | 3.250.000 | 13 | 3.250.000 | 13 | 3.500.000 | 13 | 3.750.000 | 65 | 16.250.000 |  |  |
|  |  | b | Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | desa |  | 13 | 5.500.000 | 13 | 6.500.000 | 13 | 6.500.000 | 13 | 7.000.000 | 13 | 7.500.000 | 65 | 33.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme | Meningkatnya kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan SDM aparatur |  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong dan Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a | Fasilitasi Pengisian Kades dan Perangkat Desa | Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa | desa |  | 13 | 4.500.000 | 13 | 5.000.000 | 13 | 4.500.000 | 13 | 5.000.000 | 13 | 15.000.000 | 65 | 34.000.000 |  |  |
|  |  | b | Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa | Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa | bulan |  | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.200.000 | 12 | 5.500.000 | 12 | 6.000.000 | 12 | 6.500.000 | 60 | 28.200.000 |  |  |
|  |  | c | Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan | Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan | desa |  | 13 | 0 | 13 | 2.100.000 | 13 | 5.500.000 | 13 | 6.000.000 | 13 | 6.500.000 | 65 | 20.100.000 |  |  |
|  |  | d | Fasilitasi Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pelantikan BPD antar Waktu | Terisinya kekosongan Anggota BPD | desa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **JUMLAH BELANJA LANGSUNG** | |  |  |  | **498.000** |  | **492.000.000** |  | **541.200.000** |  | **595.320.000** |  | **520.542.000** |  | **2.869.830.000** |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **JUMLAH SEMUA** | |  |  |  | **232.470.000** |  | **289.849.000** |  | **276.365.000** |  | **279.685.000** |  | **356.055.000** |  | **1.424.424.000** |  |  |

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TEMBARAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2014 – 2018**

Indikator kinerja Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai KECAMATAN TEMBARAK Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 – 2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**

Indikator Kinerja Kecamatan Tembarak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Indikator | Kondisi  Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
| Tahun 0 | Tahun 1 (2014) | Tahun 2 (2015) | Tahun 3 (2016) | Tahun 4 (2017) | Tahun 5 (2018) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Lancarnya penyaluran Raskin kepada yang berhak | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 2 | Terwujudnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | - | 6 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 54 bulan |
| 3 | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan berkurangmya tindak kriminal | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 4 | Terbinanya anggota Hansip/ Linmas di Desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 5 | Meningkatnya kondusifitas wilayah dan meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilukada | - | - | - | - | - | 13 desa | 13 desa |
| 6 | Sosialisasi pencegahan bencana alam | - | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 7 | Terciptanya kerukunan antar umat beragama | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 8 | Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan | - | - | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 52 desa |
| 9 | Meningkatnya kuantitas/kualitas kelembagaan Desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 10 | Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa | 1 desa | 1 desa | 1 desa | 1 desa | 1 desa | 1 desa | 5 desa |
| 11 | Terlaksananya kegiatan program PWK dalam rangka percepatan pembangunan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 12 | Terlaksananya kegiatan PNPM-MP Perdesaan dalam rangka percepatan pembangunan | 13desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 13 | Terlaksananya Musrenbang di tingkat Desa/ Kelurahan dan tingkat Kecamatan | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 14 | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 15 | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang partisipatif | - | 13 desa | - | - | - | - | 13 desa |
| 16 | Terlaksananya pembinaan kegiatan kepemudaan | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 48 bulan |
| 17 | Terciptanya kebersihan lingkungan desa/ Kelurahan | - | - | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 52 desa |
| 18 | Terlaksananya lomba antar sekolah SD/ MI se Kecamatan | - | - | - | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 3 keg |
| 19 | Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat di lingkungan Sekolah Dasar | 1 SD/MI | 1 SD/MI | 1 SD/MI | 1 SD/MI | 1 SD/MI | 1 SD/MI | 5 SD/MI |
| 20 | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil | - | - | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 52 desa |
| 21 | Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu | - | - | 19 dokumen | 19 dokumen | 19 dokumen | 19 dokumen | 76 dokumen |
| 22 | Tersusunnya profil Desa/ Kelurahan | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 23 | Tersusunnya profil Kecamatan | - | - | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 4 dokumen |
| 24 | Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 25 | Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 26 | Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 27 | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 28 | Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 29 | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 30 | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 31 | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Keagamaan | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 32 | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 33 | Tersedianya biaya perjalanan dinas tetap | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 34 | Tersedianya honorarium/upah tenaga kerja dan uang lembur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tersedianya komputer PC/laptop | 1 unit | 2 unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 unit |
| 37 | Tersedianya laptop untuk Subbag perencanaan | - | - | 1 unit | - | - | - | 1 unit |
| 38 | Tersedianya lcd/layar | - | - | - | - | - | - | 1 set |
| 39 | Tersedianya Kendaraan Dinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Terpeliharanya rumah dinas | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 41 | Tersedianya perlengkapan rumah dinas | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 42 | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Rumah Dinas | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 43 | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 44 | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 45 | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 46 | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | - | - | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 4 kegiatan |
| 47 | Terciptanya disiplin aparatur | - | 18 stel | - | 18 stel | - | 18 stel | 54 stel |
| 48 | Terpenuhinya target pendapatan daerah | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 49 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 50 | Terselenggaranya pemantauan kegiatan pembangunan yang berlokasi di kecamatan | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 48 bulan |
| 51 | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 52 | Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi keuangan desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 53 | Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 54 | Terciptanya koordinasi antar Kades dan Perangkat Desa | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 60 bulan |
| 55 | Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 13 desa | 65 desa |
| 56 | Terisinya kekosongan Anggota BPD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BAB VII**

**PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Tembarak Tahun 2014 - 2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 ( lima ) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegitan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2014 - 2018 melalui penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembarak.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Tembarak kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, keseungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.